



COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BAGUS AGRO PELAGA DI DESA PELAGA KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG

**I Wayan Gede Suryantika^{1*}, Drs. I Wayan Sudemen², Anak Agung Gde
Brahmantya Murti³**

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa, Indonesia

*E-mail correspondence: gedesuryantika1@gmail.com

ABSTRAK

Bagus Agro Pelaga menjadi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Badung khususnya di wilayah Badung Utara. Objek ini memanfaatkan lingkungan pertanian menjadi destinasi wisata. Dalam melihat upaya mewujudkan pengembangan wisata agro, penelitian ini membahas terkait *Collaborative Governance* dalam pengembangan objek wisata Bagus Agro Pelaga di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung. *Collaborative Governance* dinilai sebagai paradigma baru guna menghadapi isu yang beragam dalam masyarakat yang kompleks, paradigma tersebut memiliki prinsip dasar yakni adanya kesetaraan hubungan diantara pemangku kepentingan di sektor pemerintah, swasta dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait pengembangan objek wisata Bagus Agro Pelaga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait seperti: Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, pengelola Bagus Agro Pelaga, masyarakat setempat, serta studi dokumentasi terkait pengembangan Bagus Agro Pelaga. Hasil penelitian mengenai *Collaborative Governance* dalam pengembangan objek wisata Bagus Agro Pelaga, menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, dan masyarakat) telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam semua aspek. Bermula dari sektor pertanian yang kemudian dikembangkan menjadi agrowisata sebagai respon terhadap keterbatasan hasil pertanian, dengan peran awal pemerintah dan masyarakat yang masih terbatas. Dalam aspek kelembagaan, belum terdapat lembaga khusus yang menjembatani kerja sama antar pihak, sehingga pengelolaan masih bersifat mandiri oleh pihak swasta. Kepemimpinan terjalin cukup baik antara pemerintah dan pengelola, ditandai dengan peran aktif pemerintah dalam regulasi dan pelatihan, serta komitmen pengelola dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Proses kolaboratif menunjukkan kemajuan melalui dialog dan penciptaan keuntungan bersama, meskipun masih dihadapkan pada tantangan terkait komitmen dan pemahaman bersama antar *stakeholder*. Secara keseluruhan, pengembangan Bagus Agro Pelaga telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, meskipun perlu penguatan mekanisme kolaborasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Kata kunci: *collaborative governance*; pengembangan objek wisata; agrowisata; bagus agro pelaga

ARTICLE INFO

Received September 01, 2025

Revised October 11, 2025

Published November 30, 2025

ABSTRACT

Bagus Agro Pelaga is a tourism destination located in Badung Regency, particularly in the North Badung area. This destination utilizes the agricultural environment as a tourism attraction. In examining efforts to realize agro-tourism development, this study discusses the implementation of collaborative governance in the development of Bagus



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Warmadewa University

Agro Pelaga tourism destination in Pelaga Village, Petang District, Badung Regency. Collaborative governance is considered a new paradigm for addressing diverse issues in complex societies, with a fundamental principle emphasizing equality of relationships among stakeholders from the government, private sector, and community. This study aims to analyze the development of the Bagus Agro Pelaga tourism destination. The research employs a qualitative approach, with data collected through direct observation, interviews with relevant stakeholders including the Badung Regency Tourism Office, the management of Bagus Agro Pelaga, and local communities and documentation studies related to the development of Bagus Agro Pelaga. The findings indicate that collaborative governance in the development of Bagus Agro Pelaga has been implemented, but has not yet been fully optimized in all aspects. Initially originating from the agricultural sector, the area was later developed into an agro-tourism destination in response to the limited economic returns from agriculture, with the early roles of the government and local community remaining relatively limited. From an institutional perspective, there is no specific institution that functions as a mediator for collaboration among stakeholders, resulting in management that remains predominantly independent and led by the private sector. Leadership relations between the government and the management are relatively well established, as reflected in the active role of the government in regulation and training, as well as the management's commitment to empowering the local community. The collaborative process demonstrates progress through dialogue and the creation of mutual benefits; however, it continues to face challenges related to stakeholder commitment and shared understanding. Overall, the development of Bagus Agro Pelaga has had a positive impact on the local economy and community welfare, although stronger, more systematic, and sustainable collaborative mechanisms are still required.

Keywords: *collaborative governance; tourism destination development; agro-tourism; Bagus Agro Pelaga*

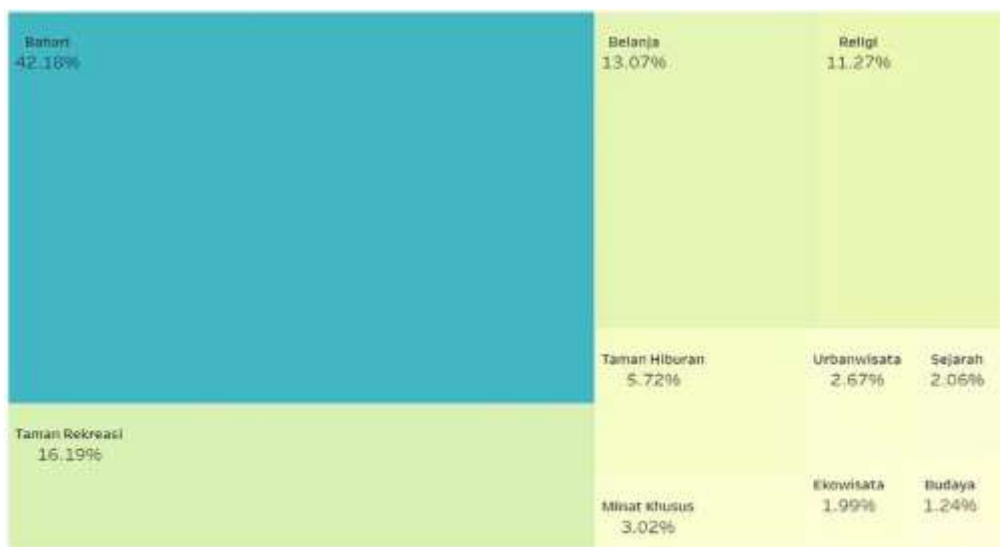
1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk lautan, matahari, pantai, dan daratan. Jika dikelola dengan baik, semua ini dapat memberikan keuntungan besar bagi negara. Salah satu cara pemanfaatannya adalah menjadikan daerah-daerah tersebut sebagai destinasi wisata. Kawasan-kawasan yang memiliki keindahan alam yang unik diharapkan dapat berkontribusi besar dalam memberikan sumber pendapatan. Dengan adanya otonomi daerah, yang dimana setiap kabupaten atau kota dituntut untuk mandiri. Salah satu ciri utama keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan finansial, yang berarti daerah harus memiliki kewenangan serta kemampuan untuk mengelola dan menggali sumber-sumber keuangan sendiri secara memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan (Setiawan, 2015). Salah satunya Bali sebagai daerah yang secara mandiri mengelola sumber daya yang dimiliki dan menjadi daya tarik tersendiri untuk dikunjungi.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2023, Bali menerima kunjungan sebanyak 5.273.258 wisatawan mancanegara. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 144,61% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022, yang tercatat sebanyak 2.155.747 kunjungan. Kabupaten Badung, yang dikenal sebagai barometer pariwisata Bali

adalah salah satu daerah yang paling diuntungkan di Bali. Dengan adanya Pariwisata yang baik di Kabupaten Badung menjadikannya lebih maju dan stabil dibandingkan daerah lainnya dalam hal fiskal, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat setempat. Dalam data kunjungan ke wisata desa seperti Desa Carangsari, Desa Petang, Desa Pelaga, dan Desa Belok yang terletak di Badung Utara, total kunjungannya per Maret 2022 adalah 2.213. Angka ini relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan ke Kuta Selatan yang dimana Berdasarkan Data Sebaran Kedatangan Wisatawan ke Kabupaten Badung Melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Per 1 Januari s/d 25 Mei 2022, tercatat sebanyak 22.988 orang. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik wisata yang lebih besar terletak di Badung Selatan (Dinas Pariwisata, 2022).

Menurut data yang dilansir dari Datains (2022), berdasarkan hasil segmentasi, menunjukan bahwa segmen wisata bahari paling banyak ditemukan di Kabupaten Badung, terutama di Kecamatan Kuta Selatan. Sebaliknya, segmen yang paling sedikit terdapat adalah segmen petualangan, yang lebih banyak berada di Badung Utara. Di Kuta Selatan, wisata minat khusus seperti paralayang, wahana olahraga air, dan menyelam juga menjadi daya tarik utama. Sementara itu, di Badung Utara, segmen wisata yang ditawarkan lebih berfokus pada Ekowisata serta wisata minat khusus yang berbasis alam dan buatan. Terlihat bahwa persebaran kunjungan wisatawan di Badung menunjukkan pola pengelompokan. Segmen wisata bahari masih menjadi yang paling populer, dengan jumlah kunjungan tertinggi dibandingkan segmen wisata lainnya. Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi pelaku industri untuk mengembangkan segmen wisata lain dengan menambahkan komponen pendukung yang dapat menarik lebih banyak pengunjung, sehingga sektor pariwisata dapat berkembang secara lebih luas dan seimbang.



Gambar 1. Kunjungan wisatawan pada berbagai segmen tipe wisata di Kabupaten Badung

Sumber: Datains, 2022

Dapat dilihat pada gambar 1, Badung memiliki potensi yang besar untuk berkembang dalam sektor pariwisata. Potensi tersebut meliputi wisata bahari, taman rekreasi, belanja, taman hiburan, wisata minat khusus, ekowisata, urban wisata, serta aspek sejarah, budaya, dan religi. Data terlihat disini menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan pada berbagai segmen tipe wisata didominasi oleh objek wisata bahari, dengan jumlah kunjungan di atas 40% dibandingkan segmen lainnya. Sementara itu, kunjungan ke ekowisata hanya mencapai 1,99%, terutama di wilayah Petang yang memiliki topografi bergunung dan menawarkan wisata ekowisata serta pertanian. Ketimpangan tersebut terlihat bahwa perkembangan

pariwisata Badung Selatan jauh lebih maksimal daripada pariwisata Badung Utara. Kecamatan Petang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Badung yang tidak memiliki potensi wisata pantai/bahari. Dengan mayoritas masyarakat sebagai petani dan didukung dengan sumber daya alam yang bagus wilayah Kecamatan Petang berpotensi pengembangan wisata ekowisata seperti pertanian kopi, Air Terjun Nungnung, Kawasan Jembatan Tukad Bangkung, Taman Bunga Belok/Sidan, dan masih banyak lagi potensi wisata yang cukup mumpuni untuk menjadi daya tarik wisatawan ke Badung Utara, namun hal ini terjadi karena masyarakat Badung Utara tidak dapat memanfaatkan atau mengelola sumber daya yang ada.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 14 (1), pengelola dan pengusaha pariwisata harus berkomitmen untuk menciptakan pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Hambatan utama dalam pengembangan destinasi sering kali berakar dari kurangnya integrasi kebijakan antar dinas terkait dan dominasi kepentingan aktor tertentu (Maturbongs & Lekatompessy, 2025). Di Badung Utara khususnya di Desa Pelaga terdapat objek wisata Bagus Agro Pelaga yang merupakan objek wisata ekowisata yang menawarkan keindahan alam dan banyak aktivitas pertanian serta edukasi pertanian. Pengembangan Bagus Agro Pelaga sebagai agrowisata bertujuan untuk memanfaatkan seoptimal mungkin potensi yang ada di daerah pelaga. Bagus Agrowisata berdiri pada akhir tahun 2004 dengan nama PT. Bagus Agro. Bagus Agrowisata ini mempunyai luas 18 hektar sehingga banyak jenis tanaman tersedia disini. Kegiatan yang bisa dilakukan di Bagus Agro Pelaga ini bermacam-macam, seperti berkeliling kebun sayur, camping, meeting, belajar membuat makanan khas Bali, dan belajar tentang berbagai jenis tanaman atau sayur-sayuran, buah-buahan dan berbagai jenis bunga yang ada di Bagus Agrowisata. Pembangunan Bagus Agro Pelaga terinspirasi dari konsep Tri Hita Karana. Melalui implementasi konsep Tri Hita Karana dalam pengembangan agrowisata yang berlandaskan nilai-nilai agama di Desa Pelaga, diharapkan mampu menjaga keseimbangan alam dan menjaga kelestarian lingkungan (Astuti, 2020). Sebagai destinasi yang terletak di kawasan Badung Utara, Bagus Agro Pelaga memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan ketimpangan pariwisata antara wilayah selatan yang masif dengan wilayah utara yang berbasis konservasi (Swastika et al., 2017).

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia dan kewirausahaan masyarakat juga masih perlu ditingkatkan. Masyarakat setempat belum sepenuhnya mampu mengelola potensi alam dan budaya secara mandiri. Pelatihan dan pembinaan yang serius diperlukan agar masyarakat dapat mengolah sumber daya tersebut menjadi paket wisata menarik. Kolaborasi dengan pihak swasta dalam pemasaran paket wisata ke Badung Utara perlu diperkuat agar desa wisata ini dapat menjadi destinasi yang wajib dikunjungi. Pemerintah harus mendorong kerjasama masyarakat dengan swasta untuk mengolah dan memasarkan produk pertanian, mencegah penjualan lahan ke pihak luar, dan memastikan bahwa lahan tetap bermanfaat bagi petani lokal.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2017-2025 terdapat poin mengenai Bagus Agro Pelaga merupakan kawasan daya tarik wisata. Dalam peraturan tersebut menyebutkan kawasan pengembangan pariwisata khususnya di Petang bertemakan agrowisata dan ekowisata berbasis konservasi lingkungan, wisata spiritual, dan wisata kerakyatan, yang dimana pariwisata agrowisata dan ekowisata merupakan jenis wisata unggulan yang di kembangkan. Adanya Bagus Agro Pelaga dan dengan adanya dukungan peraturan yang terkait merupakan langkah strategis dalam mengembangkan sektor pertanian dan pariwisata di Kabupaten Badung khususnya di Badung Utara. Selain itu, peran pemerintah dalam pengembangan Bagus Agro Pelaga yaitu dukungan kebijakan dan regulasi, dimana penetapan Desa Pelaga sebagai desa wisata pemerintah menetapkan Desa Pelaga sebagai desa wisata melalui Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010. Kebijakan ini memberikan landasan hukum untuk pengembangan dan pengelolaan wisata di Bagus Agro Pelaga (Arini et al., 2017).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dalam membangun keseimbangan pariwisata di Kabupaten Badung perlu adanya inovasi baru untuk lebih memanfaatkan sumber daya alam yang ada, seperti wisata ekowisata Bagus Agro Pelaga merupakan suatu *resort* dan objek wisata yang berbasis ekowisata yang menawarkan paket wisata. Selain itu Objek wisata ini menawarkan perkebunan buah-buahan, sayur-sayuran serta pengunjung dapat melihat tempat aktivitas seperti pembuatan gula aren, tempat *coffee roasting*, rumah para petani dan aktivitas lainnya. Ketidakharmonisan ini sejalan dengan temuan riset yang menyatakan bahwa pembangunan pariwisata sering kali terhambat oleh lemahnya komunikasi antar-lembaga dan dominasi salah satu pihak yang memicu konflik pemanfaatan lahan (Hajar & Syafrizal, 2025). Kolaborasi pemerintah dan swasta sangat penting dalam pembangunan destinasi pariwisata, termasuk dalam penyediaan infrastruktur dan layanan pariwisata yang kompetitif (Rhama & Setiawan, 2020). Untuk melihat kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata melalui pertanian di Bagus Agro Pelaga tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan riset yang berfokus pada *Collaborative Governace* dalam pengembangan objek wisata. Konsep ini menekankan pada keterlibatan aktor non-negara dalam proses pengambilan kebijakan yang bersifat formal, konsensual, dan bertujuan untuk mencapai tujuan bersama yang tidak bisa dicapai secara mandiri. Kolaborasi *governance* melibatkan proses tatap muka dan pembangunan kepercayaan (*trust building*) yang krusial untuk menghasilkan konsensus dalam pembangunan daerah (Patadjenu et al., 2023). Melalui riset ini nantinya diharapkan dapat menguraikan kolaborasi yang terbentuk dalam mewujudkan pengembangan maupun pembangunan wisata di Kabupaten Badung yang berbasis pada ekowisata.

2. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif atau disebut juga penelitian natural atau penelitian alamiah adalah jenis penelitian dengan mengutamakan pendekatan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif. Penelitian kualitatif mendeskripsikan kejadian yang didengar, dirasakan dan dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif. Pada penelitian kualitatif teori hanya dibatasi sebagai suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat preposisi, yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris. Sedangkan yang dimaksud deskriptif yaitu data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Penelitian ini menekankan pada kolaborasi pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam pengembangan objek wisata Bagus Agro Pelaga. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar, yang mendeskripsikan kejadian yang didengar, dirasakan, dan dibuat dalam bentuk naratif. Pendekatan ini membantu melihat kolaborasi dari sektor pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam pengembangan objek wisata Bagus Agro Pelaga. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipatif, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Adapun teknik penentuan informan yang digunakan pada penelitian ini melalui *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data dan hasil temuan penelitian mengenai *Collaborative Governace* dalam pengembangan Objek Wisata Bagus Agro Pelaga, maka hasil penelitian ini dapat disajikan dalam tabel matriks berikut ini:

1) Kondisi Awal

Kondisi awal dalam pengembangan Wisata di Badung Utara khususnya Bagus Agro Pelaga di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, didasarkan pada potensi utama wilayah tersebut, yaitu sektor pertanian. Mayoritas masyarakat Desa Pelaga berprofesi sebagai petani, menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian utama sebelum berkembangnya sektor pariwisata. Sedangkan wilayah Badung Selatan seperti perkembangan wisata bahari, khususnya di daerah seperti Nusa Dua, Tanjung Benoa, Kuta dan Seminyak, sangat pesat dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar. Selain itu potensi yang ada di Badung Selatan seperti wisata Pantai, Garuda Wisnu Kencana, Taman Rekreasi Hutan Bakau, Kawasan luar Pura Uluwatu dan potensi lainnya merupakan potensi yang besar dalam pengembangan wisata (Dinas Pariwisata, 2022).

Dengan potensi pertanian, pengembangan wisata di Badung Utara untuk memberikan penawaran dengan memanfaatkan pengembangan agrowisata di wilayah ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pertanian yang telah ada, sekaligus membuka peluang baru dalam sektor pariwisata yang berbasis keberlanjutan dan kearifan lokal. Hasil wawancara bersama Bapak A. A. Gede Ngurah Oka selaku HRD Bagus Agro Pelaga, yang menyatakan bahwa :

"Awal mula adanya Bagus Agro pada tahun 2004 merupakan hanya agro, dimana area disini milik ITDC yaitu pusat pengembangan pariwisata yang ada di nusa dua, awal mulanya berdirinya agro direncanakan menyatu antara produk lokal dengan adanya pusat pariwisata di nusa dua, untuk menopang kebutuhan hasil pertanian untuk hotel di nusa dua dan ini merupakan ide awal sebelum adanya pengembangan wisata" (A. A. Gede Ngurah Oka, Maret 2025)

Pengembangan Agro Pelaga pertama kali didirikan pada tahun 2004 dengan fokus utama pada pertanian, yang berlokasi di area milik ITDC (*Indonesia Tourism Development Corporation*), yang merupakan pusat pengembangan pariwisata di Nusa Dua. Pada awalnya, tujuan pendirian agro ini adalah untuk mengintegrasikan produk pertanian lokal dengan keberadaan pusat pariwisata di Nusa Dua. Tanah yang ada di wilayah ini digunakan sebagai lahan pertanian yang hasilnya untuk mendukung kebutuhan bagi hotel-hotel di Nusa Dua, dengan konsep awal yang mengutamakan pengembangan sektor pertanian untuk mendukung pariwisata. Namun perkembangan aktivitas agro tersebut tidak berjalan efektif karena hasil dari pertanian agro tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hotel di Nusa Dua sedangkan dengan potensi alam, budaya, pertanian wilayah Desa Pelaga sudah sangat tepat dalam perkembangan pertanian, serta pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat dan pertanian. Maka dari itu, merespon potensi yang ada pemerintah Kabupaten Badung mengeluarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010, tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Badung, dan Desa Pelaga ditetapkan sebagai wilayah desa wisata. Hal ini di sampaikan oleh Bapak A. A. Gede Ngurah Oka selaku HRD Bagus Agro Pelaga, yang menyatakan bahwa:

"Namun perkembangan selanjutnya pada tahun 2010 adanya transisi, ternyata hasil pertanian di agro pelaga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan perhotelan disana dan dari segi hasil dan skil pertaniannya kurang mendukung produktivitasnya sehingga hasil prodak di agro ini kurang dalam jumlah dan kurang dalam kualitasnya sehingga adanya stagnan dalam aktivitas agronya, merespon hal tersebut maka di kembangkanlah agro pertanian tersebut menjadi agrowisata" (A. A. Gede Ngurah Oka, Maret 2025).

Menanggapi hal tersebut dalam memanfaatkan potensi, maka Bagus *Discovery Group* berkolaborasi dengan ITDC mengembangkan sebuah usaha agrowisata di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Kawasan agrowisata yang diberi nama Bagus Agro Pelaga merupakan kawasan agrowisata yang menawarkan atraksi kepada pengunjung untuk menikmati pemandangan perkebunan buah, sayur dan bunga serta teknik pertanian modern

sambil berekreasi, berbelanja tabulapot (tanaman buah dan bunga dalam pot) dan menikmati makan siang di restoran atau saung yang berada di dalam kawasan Bagus Agro Pelaga. Selain aktivitas tersebut dalam pengembangan fisik terdapat pembangunan pendukung dalam menunjang kegiatan ekowisata seperti adanya rumah penginapan, restoran, wantilan, gazebo, *jogging track*, *camping ground* dan tempat aktivitas lainnya. Maka dari itu pengembangan agrowisata ini merupakan langkah positif yang sesuai dengan kebijakan pemerintah serta sesuai dengan potensi yang ada di Desa Pelaga yang berorientasi pada pertanian. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Kasubag Kepegawaian dan Perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yaitu:

"Wilayah Badung Utara memiliki konsen daerah pertanian dan sejalan dengan apa yang di kembangkan oleh Bagus Agro tersebut" (I Gusti Agung Ngurah Maha Adi Putra, SST.Par., Maret 2025).

Berdasarkan potensi yang dimiliki, wilayah Badung Utara, khususnya Desa Pelaga, merupakan daerah dengan potensi pertanian yang sangat layak untuk dikembangkan. Melihat potensi tersebut, serta pentingnya pelestarian lingkungan, Pemerintah Kabupaten Badung mengeluarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Badung, yang di dalamnya menetapkan Desa Pelaga sebagai salah satu desa wisata. Menanggapi hal tersebut, dalam rangka memanfaatkan potensi yang ada, Bagus *Discovery Group* berkolaborasi dengan ITDC mengembangkan sektor pertanian menjadi agrowisata melalui pendirian Bagus Agro Pelaga di Desa Pelaga. Pengembangan Bagus Agro Pelaga juga diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur fisik untuk menunjang kegiatan ekowisata, seperti rumah penginapan, restoran, wantilan, gazebo, *jogging track*, *camping ground*, dan fasilitas penunjang lainnya. Maka dengan adanya potensi alam, dukungan kebijakan pemerintah, serta inisiatif pengembangan agrowisata ini menjadi langkah positif dalam mendorong pertumbuhan pariwisata dan perekonomian daerah khususnya di Kabupaten Badung.

2) Desain Kelembagaan

Objek Wisata Bagus Agro Pelaga dalam pengelolaannya dikelola oleh sektor swasta yaitu Bagus Agro *Discovery* yang mengelola langsung dalam administrasi atau aktivitas agro. Untuk lembaga khusus dalam menjembatani kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan Bagus Agro Pelaga saat ini belum ada desain kelembagaan yang khusus, tetapi dari sektor pemerintah terdapat Bidang Destinasi yang dimana bidang tersebut memiliki fungsi atau wewenang dalam proses menerima usulan dari masyarakat, penetapan suatu destinasi, dan pengelolaan dalam destinasi yang sudah berkerjasama dengan pemerintah Kabupaten Badung. Sedangkan dalam sektor swasta, pihak Bagus Agro Pelaga sebagai pengelola langsung berhubungan dengan pemerintah atau masyarakat secara mandiri tanpa melalui lembaga lain. Hal ini disampaikan Kasubag Kepegawaian dan Perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yaitu:

"Dalam pemerintah terdapat Bidang Destinasi yang mengurus dari adanya usulan masuk sebagai destinasi dan akhirnya ditetapkan sebagai destinasi terdapat bidang tersebut yang mempunyai tupoksi untuk destinasi" (I Gusti Agung Ngurah Maha Adi Putra, SST.Par., Maret 2025).

Sejalan dengan hal itu, HRD Bagus Agro Pelaga juga menyatakan bahwa:

"Dulu kita pernah kerja sama dengan karang taruna desa, namun tidak bisa bertahan lama karena organisasinya silih berganti dan walaupun adanya kegiatan dari intansi atau perorangan yang berkaitan dengan Agro, semua kegiatan dilakukan sendiri" (A. A. Gede Ngurah Oka, Maret 2025).

Jadi dalam pengembangan objek wisata Bagus Agro Pelaga, saat ini belum ada lembaga khusus yang menjembatani kerja sama antara *stakeholder*. Namun khusus di sektor pemerintah, terdapat bidang destinasi yang memiliki tugas dan wewenang dalam menerima usulan, menetapkan destinasi, dan mengawasi destinasi yang telah bekerja sama dengan

pemerintah Kabupaten Badung. Sementara itu, dalam sektor swasta, pengelola Bagus Agro Pelaga langsung berhubungan dengan pemerintah atau masyarakat tanpa melalui lembaga lain.

3) Kepemimpinan

Dalam pengembangan objek wisata Bagus Agro Pelaga, kepemimpinan yang ada di Bagus Agro Pelaga dalam hal pengembangan pariwisata yaitu kepemimpinan kolaboratif (*collaborative leadership*). Dalam kepemimpinan dari pemerintah seperti ijin regulasi/kebijakan yaitu adanya Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010, tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Badung, Desa Pelaga ditetapkan sebagai wilayah desa wisata. Dari adanya penetapan peraturan tersebut maka terdapat perkembangan pariwisata khususnya di Desa Pelaga yang dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar. Selain itu dukungan melalui pelatihan dan pemasaran merupakan motivasi pemerintah dalam pengembangan wisata. Peran pemerintah mengadakan pelatihan pemandu wisata alam ekowisata yang ada di Kabupaten Badung yang dilaksanakan di objek wisata Bagus Agro Pelaga, yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Badung pada tanggal 27 September 2022. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan penguasaan dan pengetahuan serta ketrampilan bagi pemandu tentang wisata alam ekowisata. Berikut merupakan gambar kegiatan pemerintah yang menjadi mediator sekaligus fasilitator dalam pengembangan pariwisata:



Gambar 2. Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata di Kabupaten Badung

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, 2022

Dari gambar di atas dapat dilihat bagaimana peran pemerintah mengadakan pelatihan pemandu wisata alam ekowisata yang ada di Kabupaten Badung yang dilaksanakan di objek wisata Bagus Agro Pelaga. Selain itu dalam pemasaran pariwisata, dalam event BBTF (*Bali & Beyond Travel Fair*) yang diselenggarakan oleh ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia) Bali, Pemerintah Kabupaten Badung ikut berperan berkolaborasi dalam penyelenggaraan pameran tersebut. Dalam *event* tersebut adanya pemasaran langsung melalui pameran wisata yang diikuti oleh pelaku wisata yang ada di Bali. Hal ini disampaikan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung menyatakan bahwa:

"Jadi dalam pelatihan pariwisata terkadang kita ada waktu tertentu dalam mengadakan pelatihan seperti pelatihan pemandu wisata yang biasanya kita laksanakan. Serta dalam promosi atau pemasaran Bagus Agro Pelaga di ikut sertakan dalam pameran yang dilaksanakan dalam event Bali Beyond Travel Fair (BBTF) disana diarahkan untuk memasarkan langsung tanpa perantara pemerintah dan pemerintah hanya memfasilitasi menyelenggarakan dan bertanggungjawabkar" (I Gusti Agung Ngurah Maha Adi Putra, SST.Par., Maret 2025).

Jadi kolaborasi pemerintah dengan swasta dalam kepemimpinan cukup terealisasi dalam regulasi/kebijakan, pemasaran, dan pelatihan. Selanjutnya kepemimpinan dari sektor swasta dalam pengembangan sangat berperan penting dalam pembangunan fisik dari Bagus Agro Pelaga. Pembangunan fisik yang dimaksud pembangunan rumah penginapan, restoran, wantilan, gazebo, *jogging track*, *camping ground* dan tempat aktivitas lainnya. Contohnya seperti beberapa gambar:



Gambar 3. Pembangunan Fisik Dari Pengelola Bagus Agro Pelaga

Sumber: Instagram @bagusagropelaga, 2019

Selain pembangunan fisik pemimpin sektor swasta terhadap masyarakat juga meperdayakan masyarakat lokal khususnya dalam sistem kepegawaian, Pengelola Bagus Agro Pelaga sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal dengan memberikan perhatian yang serius terhadap pemberdayaan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan melalui penyediaan kesempatan kerja yang sesuai dengan potensi dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan memberdayakan masyarakat lokal, peran ini sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh HRD Bagus Agro Pelaga menyatakan bahwa:

"Dalam proses pengembangan agrowisata ini hampir seluruh tenaga yang digunakan di Bagus Agro Pelaga memberdayakan masyarakat setempat" (A. A. Gede Ngurah Oka, Maret 2025).

Sejalan dengan hal ini, masyarakat lokal sekaligus pegawai perkebunan Bagus Agro Pelaga juga menyatakan bahwa:

"Untuk dapat bekerja di Bagus Agro Pelaga, diutamakan masyarakat lokal yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan perusahaan. Saya sendiri telah bekerja di sini selama hampir 18 tahun. Sebelumnya, saya hanya berprofesi sebagai petani. Namun, sejak kehadiran Bagus Agro, saya memiliki kesempatan untuk bekerja sambil tetap ada dilingkungan sendiri." (Ni Made Widiati, Maret 2025).

Berdasarkan penelitian pengembangan objek wisata Bagus Agro Pelaga, dalam indikator kepemimpinan dari sektor pemerintah berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Badung menunjukkan perannya melalui kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata, yang menetapkan Desa Pelaga sebagai desa wisata. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam penyelenggaraan pelatihan pemandu wisata alam ekowisata yang dilaksanakan di Bagus Agro Pelaga. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mendukung pengembangan wisata berbasis alam. Di sisi promosi, pemerintah juga memfasilitasi pelaku wisata untuk mengikuti event nasional seperti Bali & *Beyond Travel Fair* (BBTF), sehingga pelaku wisata dapat memasarkan produk mereka secara langsung.

Sementara itu, kepemimpinan sektor swasta melalui pengelola Bagus Agro Pelaga sangat berperan dalam pengembangan fisik destinasi wisata. Pengelola membangun berbagai fasilitas pendukung seperti rumah penginapan, restoran, gazebo, wantilan, *jogging track*, dan *camping ground*. Tak hanya itu, pengelola juga sangat memperhatikan pemberdayaan masyarakat lokal dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang disesuaikan dengan keterampilan masyarakat sekitar. Hampir seluruh tenaga kerja diambil dari masyarakat

setempat. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan swasta tidak hanya mendorong kemajuan sektor pariwisata, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

4) Proses Kolaboratif

Dalam proses kolaboratif dalam pengembangan objek wisata Bagus Agro Pelaga sudah terpenuhi dengan antar sektornya. Dialog tatap muka merupakan proses membangun komunikasi antar *stakeholder* yang terkait dalam suatu kolaborasi. Dalam pengembangan wisata Bagus Agro Pelaga penerapan dialog tatap muka dari sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat terlihat dalam proses regulasi/kebijakan merupakan kegiatan yang diawali dengan adanya dialog antar *stakeholder*. Selanjutnya membangun kepercayaan, membangun kepercayaan merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dari proses dialog tatap muka. Dimana dalam pengembangan wisata Bagus Agro Pelaga membangun kepercayaan merupakan tahapan awal sebelum adanya kolaborasi dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Membangun kepercayaan merupakan proses saling meyakinkan melalui dialog agar terdapat kolaborasi-kolaborasi antar *stakeholder* seperti adanya regulasi/kebijakan, kegiatan pelatihan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan Wisata Bagus Agro Pelaga. Selanjutnya yaitu hasil antara (keuntungan), hasil keuntungan bersama yang di maksud dalam pengembangan objek wisata Bagus Agro Pelaga yaitu adanya regulasi/kebijakan, pelatihan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat lokal hal itu merupakan keuntungan dari sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat yang terkait dalam kolaborasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung menyatakan bahwa:

"Dalam proses regulasi/kebijakan selain melalui FGD sebelum adanya destinasi ditetapkan pastinya ada forum ada pembicaraan karena pemerintah tidak sendiri karena sekarang ada juga akademisi untuk menentukan bisa atau tidaknya untuk di jadikan destinasi seperti adanya monitoring dan evaluasi" (I Gusti Agung Ngurah Maha Adi Putra, SST.Par., Maret 2025).

Proses dialog tatap muka, membangun kepercayaan dan hasil antara (keuntungan) dalam pengembangan wisata Bagus Agro Pelaga ini sudah terealisasi. Dengan adanya proses regulasi/kebijakan destinasi yang dimana penetapan tersebut melalui proses FGD (*Focus Group Discussion*) yang pastinya dalam forum tersebut terdapat dialog tatap muka dan membangun kepercayaan dari antar *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan wisata. Serta dengan ditetapkan suatu regulasi/kebijakan merupakan keuntungan bersama dalam setiap aktor yang terkait seperti swasta dengan mendapatkan izin merupakan suatu keuntungan untuk mengembangkan suatu bisnis dalam pengembangan wisata, masyarakat dengan dengan keuntungan memanfaatkan lapangan pekerjaan yang dimana dalam pengembangan wisata agrowisata tidak jauh dari aktivitas masyarakat lokal, dan keuntungan pemerintah selain pajak, dengan membuat regulasi/kebijakan terhadap potensi wisata yang mensejahterakan masyarakat hal tersebut merupakan suatu keuntungan tercapainya salah satu tujuan pemerintah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung menyatakan bahwa :

"Dalam keuntungan, dipastikan keuntungannya kembali kepada masyarakat dan pemerintah hanya sebagai regulator saja yang menerbitkan kebijakan yang tujuannya memanfaatkan potensi untuk mensejahterakan masyarakat" (I Gusti Agung Ngurah Maha Adi Putra, SST.Par., Maret 2025).

Selain regulasi/kebijakan Seperti dalam berita Dinas Pariwisata, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Badung membuka secara resmi acara Pembukaan Pelatihan Pemandu Wisata Alam Ekowisata di Kabupaten Badung, Selasa, 27 September 2022 bertempat di Bagus Agro Pelaga, Desa Pelaga. Yang dimana Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan dan pengetahuan serta keterampilan bagi pemandu tentang wisata alam ekowisata. Wisata alam ekowisata perlu dikemas dengan baik agar para wisatawan dan

pengelola destinasi dapat menciptakan wisata berkelanjutan dengan melakukan prinsip-prinsip ekowisata (Dinas Pariwisata, 2022). Hal ini juga merupakan contoh dalam proses dialog tatap muka, membangun kepercayaan dan hasil antara ini merupakan proses yang sudah terbilang sudah terpenuhi. Karena dalam proses terlaksananya program ini pastinya ada koordinasi dialog antar sektor yang terlibat seperti pemerintah yang menyelenggarakan dan sektor swasta yang memfasilitasi dan masyarakat yang terkait mengikuti pelatihan, serta dalam keuntungan bersama dari tiga sektor ini sama sama mendapatkan keuntungan dalam kolaborasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung menyatakan bahwa:

"Dalam program pengembangan wisata ada beberapa program yang berkolaborasi langsung dengan objek wisata dan masyarakat. seperti program Pelatihan Pemandu Wisata. Jadi menurut saya ini merupakan suatu kolaborasi dan dukungan pemerintah dalam pengembangan wisata yang ada di Badung" (I Gusti Agung Ngurah Maha Adi Putra, SST.Par., Maret 2025).

Sejalan dengan hal ini masyarakat lokal sekaligus pegawai Bagus Agro Pelaga juga menyatakan bahwa :

"Dukungan dari pemerintah ada program pelatihan seperti adanya program pelatihan pariwisata ekowisata yang kebetulan dilaksanakan disini langsung, yang dimana itu merupakan program yang positif bagi masyarakat terkait dalam pengembangan wisata. Dengan adanya pelatihan hal tersebut sangat mendukung peningkatkan penguasaan dan pengetahuan serta keterampilan bagi pemandu wisata" (I Dewa Gede Oka, Maret 2025).

Proses selanjutnya yaitu komitmen dalam proses kolaborasi, komitmen dalam proses kolaborasi merupakan adanya kondisi saling ketergantungan antara pemangku kepentingan. Dalam pengembangan wisata Bagus Agro Pelaga kondisi saling bergantung ini terdapat dalam sektor swasta dan masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam kolaborasi pengembangan wisata ini dimana Bagus Agro Pelaga memanfaatkan masyarakat setempat untuk berkerja dalam pengelolaan agro wisata tersebut serta dari masyarakat itu sendiri beberapa juga ketergantungan dalam adanya Bagus Agro Pelaga yang merupakan sumber pendapatan ekonomi. Sedangkan dari sektor pemerintah hanya sebagai regulator yang merupakan tugas pemerintah dalam pembuatan regulasi/kebijakan apabila sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku serta memfasilitasi dalam pelatihan dan pemasaran, jadi hal tersebut bukan merupakan kondisi saling ketergantungan dari sektor pemerintah.

Selanjutnya yaitu pemahaman bersama, pemahaman bersama merupakan adanya tujuan bersama yang jelas dari *stakeholder* yang terkait dalam kolaborasi. Pemahaman bersama dalam pengembangan wisata Bagus Agro Pelaga dari sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat yaitu mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya pengembangan wisata ini, dipastikan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, serta memperkuat potensi ekonomi. Pemerintah berperan dalam menyediakan regulasi dan dukungan pelatihan serta pemasaran, pihak swasta sebagai pengembangan dalam pembangunan fisik dalam menunjang aktivitas wisata, sedangkan masyarakat menjadi pekerja dalam pengembangan Agro Wisata serta menjaga kelestarian lingkungan. Jadi kolaborasi yang dibangun atas dasar pemahaman bersama ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, yang menjadi tujuan utama seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan wisata Bagus Agro Pelaga. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Kasubag Kepegawaian dan Perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yaitu:

"Harapan pemerintah pastinya untuk mensejahterakan masyarakat, apapun konteks pengembangannya yang pasti muaranya harus mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya pengembangan wisata agrowisata memberikan dampak positif, terutama karena konsepnya yang berfokus pada pelestarian lingkungan" (I Gusti Agung Ngurah Maha Adi Putra, SST.Par., Maret 2025).

Sejalan dengan hal itu, HRD Bagus Agro Pelaga juga menyatakan bahwa:

“*Dengan melibatkan masyarakat dan mengembangkan pariwisata yang berbasis pertanian hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat*” (A. A. Gede Ngurah Oka, Maret 2025).

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses kolaboratif dalam pengembangan objek wisata Bagus Agro Pelaga telah terlaksana dengan baik melalui keterlibatan aktif antar sektor, yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Proses kolaborasi ini ditunjukkan melalui dialog tatap muka yang menjadi fondasi awal terbentuknya kepercayaan, serta menghasilkan keuntungan bersama dengan adanya regulasi/kebijakan, pelatihan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini diperkuat oleh komitmen dan kondisi saling ketergantungan antara swasta dan masyarakat, namun kondisi saling ketergantungan dengan pemerintah perlu ditingkatkan, serta didukung pemahaman bersama bahwa tujuan utama dari pengembangan wisata ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat lokal. Seluruh proses tersebut menggambarkan bahwa pengembangan Bagus Agro Pelaga tidak hanya berorientasi pada peningkatan sektor pariwisata, tetapi juga bertumpu pada prinsip keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Collaborative Governance* dalam pengembangan objek wisata Bagus Agro Pelaga, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat telah terjalin dengan baik. Dari segi kondisi awal, pengembangan dimulai dari potensi pertanian yang dikembangkan menjadi agrowisata, dimana pemerintah berperan dalam regulasi, pelatihan, dan pemasaran, pihak swasta membangun sarana fisik seperti penginapan dan fasilitas wisata lainnya, serta masyarakat terlibat sebagai tenaga kerja. Dalam desain kelembagaan, pemerintah telah membentuk bidang destinasi untuk menerima usulan dan melakukan pengawasan, meskipun belum terdapat lembaga khusus yang menjembatani ketiga pihak, sehingga pengelola Bagus Agro Pelaga menjalankan operasional secara mandiri. Dari aspek kepemimpinan, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010, menyelenggarakan pelatihan serta promosi melalui event seperti BBTF, sementara pengelola fokus pada pengembangan fisik dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam proses kolaboratif, telah terbangun komunikasi yang efektif melalui dialog tatap muka yang menciptakan kepercayaan dan keuntungan bersama, meskipun hubungan antara masyarakat dan swasta lebih erat dibandingkan dengan pemerintah. Secara keseluruhan, kolaborasi antar pemangku kepentingan ini telah mendorong pengembangan wisata yang tidak hanya berfokus pada aspek pariwisata semata, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan sosial dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.

5. REFERENSI

- Arini, D., Nityasa, N., & Yudianta, K. (2017). Resor Agrowisata di Pelaga. *Jurnal Teknik Gradien*, 9(1), 37-63.
- Astuti, R., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik (Pertama)*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Datans. (2022). Melihat Dominasi dan Segmentasi Pariwisata di Kabupaten Badung, Bali. <https://datans.medium.com/melihat-dominasi-dan-segmentasi-pariwisata-di-kabupaten-badung-bali-fbd8a56d8208>
- Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. (2022). Data Kunjungan Wisatawan. <https://dispar.badungkab.go.id/data-kunjungan-wisatawan>.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. (2022). Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata di Kabupaten Badung 2022. <https://dispar.badungkab.go.id/berita/44363-pelatihan-pemandu-wisata-buatan-di-kabupaten-badung-2022>.

- Hajar, S., & Syafrizal. (2025). Evaluasi Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Sound Governance di Kawasan Danau Toba. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 6(1), 318–333. <https://doi.org/10.29103/jspm.v6i2.21666>.
- Maturbongs, E. E., & Lekatompessy, R. L. (2025). Collaborative Governance of the Tourism Potential Development in Merauke District. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 14(2), 361–371. <https://doi.org/10.23887/jish.v14i2.91755>.
- Patadjenu, S., Silitonga, M. S., & Asropi, A. (2023). Tata Kelola Kolaboratif Pengembangan Pariwisata Likupang, Kabupaten Minahasa. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 17(1), 23–48.
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Badung Tahun 2017-2025.
- Peraturan Daerah Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Badung.
- Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali.
- Rhama, B., & Setiawan, F. (2020). Assessing Public Private Partnership in Indonesia Tourism. *Policy & Governance Review*, 4(3), 197–209. <https://doi.org/https://doi.org/10.30589/pgr.v4i3.339>.
- Setiawan, Iwan. (2015). Potensi Destinasi Wisata di Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank*.
- Swastika, I. P. D., Budhi, M. K. S., & Dewi, M. H. U. (2017). Analisis Pengembangan Agrowisata Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4103–4136.